

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib, 2009, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andasasmita, Komar, 1984, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2000, *Manajemen Penelitian*, Rinneka Cipta, Jakarta.
- Bertens, K., 1997, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Koesoemawati, Ira & Yunirman Rijan, 2014, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Lumban Tobing, G.H.S, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Moechtar, Oemar, 2017, *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, CDSBL, Yogyakarta,.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2009, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Di Masa Akan Datang*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta.
- Subekti, 2006, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/Artikel/Tesis-Disertasi

- Berita Acara Pemeriksaan dari Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Cilacap.
- Anggraeni, Ayu Dian, 2018, Tinjauan Yuridis Terkait Penolakan Magang Calon Notaris Di Kota Makassar, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Muhammad Haris, Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. *Jurnal*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Banjarmasin.
- Kuntjoro, Nedy, 2016, Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta Terhadap Perilaku Notaris di Kota Yogyakarta Menurut Kode Etik Notaris, *Jurnal Penelitian*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Kusumo, Agung Dhani, "Penerapan Sanksi Etika Atas Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan di Kabupaten Sleman", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2015.
- Muzakkar, T., 2008, Perbandingan Peranan Dewan Kehormatan Dengan Majelis Pengawasan Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum USU, Pada Sekolah Pasca Sarjana, Medan.
- Rahayu, Hastari Endah, 2014, "Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Pengawasan Tugas Jabatan Notaris di Kabupaten Cilacap", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- S, Laurensius Arlima Sumbangsi Werda Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, *Jurnal*, Vol.30 No.3 September.
- Sulhan, dkk, *Jurnal*, Pelaksanaan Kode Etik Dalam Menjalankan Jabatan Notaris, Program Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Sulistiyono, 2009, *Jurnal*, Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Di Kabupaten Tangerang, Universitas Diponegoro, Semarang.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432

Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.Pr.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

D. Internet

<http://media.neliti.com/media/publications/30013-ID/pengawasan-majelis-pengawas-daerah-terhadap-notaris-setelah-berlakunya-undang-un.pdf>
diakses pada tanggal 2 Mei 2018 pada pukul 13.30 WIB.

http://digilib.unila.ac.id/393/4/Ahmad%20Denny%20Salthori_Bab%20II.pdf,
diakses pada tanggal 4 April 2018 Pukul 17:00 WIB.

PDFrepository.uin-suska.ac.id, diakses, pada tanggal 5 April 2018 Pukul 09:45 WIB

<http://jurnalmanajemn.com/pengertian-pengawasan> diakses pada tanggal 15 Mei 2018 pada pukul 15.00 WIB

E. Wawancara

Hasil Wawancara Majelis Kehormatan Daerah Unsur Akademis, Saryono Hanadi, pada tanggal 25 September 2018, Pukul 17:00 WIB.

Hasil Wawancara kepada Dewan Kehormatan Daerah Sumardi, Pada Tanggal 20 September 2018, Pukul 10:00, WIB.

Hasil Wawancara Majelis Pengawas Daerah Unsur Pemerintahan Tarmono, pada tanggal 25 September 2018, pukul 13:00 WIB.

Hasil Wawancara Majelis Pegawas Daerah Unsur Notaris Kurnia Armunanto, Pada Tanggal 19 September 2018, Pukul 19:00. WIB.

Hasil Wawancara Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman Yulkarnain Harahab, pada tanggal 18 Desember 2018, pukul 14.00 WIB.

Hasil Wawancara Notaris XXX Pada Tanggal 29 Desember 2018, Pukul 16.00 WIB